

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP) TAHUN 2016



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

Nama SKPD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : 1. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik
4. Pelaksanaan fasilitasi penelenggaraan pemilihan umum
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Persentase kasus isu SARA	$\frac{\text{Jumlah kasus isu SARA yg tertangani}}{\text{Jumlah kasus isu SARA yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional.	Laporan Kegiatan
		Persentase penurunan konflik di masyarakat	$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan	Laporan Kegiatan

				Nasional, Bidang Ideologo dan Wawasan Kebangsaan	
2.	Meningkatnya kualitas LSM/ORMAS/ Partai Politik	Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang aktif	$\frac{\text{Jml LSM/ORMAS/Parpol yang aktif}}{\text{Jml Parpol yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Politik Dalam Negeri	Laporan Kegiatan
		Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah peserta yang memahami pembinaan politik}}{\text{Jumlah peserta sosialisasi pembinaan politik}} \times 100 \%$	Bidang Politik Dalam Negeri	Laporan Kegiatan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai jadwal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239 /IX / 6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2016.

Demikian laporan akhir, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Mojokerto, 28 Pebruari 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660807 199203 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	4
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.2.2. Struktur Organisasi	5
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD	5
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Perencanaan Kinerja	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.1.1. Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	7
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
Sasaran 1. Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	10
a. Persentase kasus isu SARA yang tertangani	11
c. Persentase penurunan konflik di masyarakat	12
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas LSM/Ormas/Parpol	12
a. Persentase LSM/Ormas/Parpol	17
b. Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
C. Alokasi per Sasaran Pembangunan	21
D. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	21
E. Efisiensi penggunaan sumber daya	22
F. Realisasi Anggaran	22
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

Lampiran

1. Komposisi karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
3. IKU 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota Mojokerto menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja ini disusun berdasarkan :

1. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999
2. Surat Keputusan LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999
3. Surat Keputusan LAN RI Nomor : 239 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan LAKIP.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015 yang meliputi kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis tahun 2014-2019, yaitu (1) Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Meningkatnya kualitas dana Partai Politik.

Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau

penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di tahun mendatang.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan nasional serta pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Komposisi karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana pada tabel 1.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto terdiri atas :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Ideologi
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
5. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga
 - b. Sub Bidang Pembinaan Politik

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana pada tabel 2

1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan
5. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial
6. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
7. Peningkatan kapasitas atas hukum, keamanan, stabilitas dan partisipasi politik

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah prioritas ke lima dan tujuh yaitu peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial serta masyarakat yang bermoral ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas, memiliki kualitas keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial. Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan serta pengawasan dan pengendalian perilaku menyimpang, selain itu Kota Mojokerto juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2014-2019, ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yang difokuskan pada 6 (enam) aspek utama, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
3. Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing
4. Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
5. Tata Ruang dan Infrastruktur Publik
6. Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Bakesbangpol adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”** artinya seluruh komponen masyarakat Kota Mojokerto bersatu padu dalam mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih dalam mendukung situasi politik yang kondusif, tidak menemui kesulitan dalam pembahasan produk-produk hukum maupun kebijaksanaan yang menjadi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta tidak adanya gejolak di masyarakat.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah **“ Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat kota Mojokerto yang Partisipati, Demokratis dan beretika dalam wadah NKRI”**

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk melaksanakan Misi , maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan : Meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang kondusif

Sasaran : Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sasaran Meningkatnya kualitas dana Partai politik

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut secara garis besar merupakan Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto.

Adapun Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL PENETAPAN SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	- Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan - Persentase kasus isu SARA - Persentase penurunan	80 % 85 % 85 %

		konflik di masyarakat	
2	Meningkatnya kualitas dana Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Parpol yang patuh terhadap tata cara pada bantuan keuangan Parpol - Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri 	<p>70 %</p> <p>80 %</p>

Untuk mencapai target sasaran tersebut, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Pembinaan Kewilayahan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa
 - d. Pemantapan forum pembauran kebangsaan
 - e. Sosialisasi wawasan kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
 - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Koordinasi forum – forum diskusi politik
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
 - a. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda)
 - b. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di masyarakat

- c. Pemantauan kegiatan orang asing
- d. Penyusunan dan pengumpulan data
- e. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada tahun 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai Tujuan : Meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang kondusif dengan 2 (dua) sasaran, Sasaran (I) Meningkatkan peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan, (2) Persentase kasus isu SARA, (3) Persentase penurunan konflik di masyarakat, dan Sasaran (II) Meningkatnya kualitas dana Partai Politik, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan keuangan Parpol, (2) Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri. Pencapaian dari 5 (lima) Indikator Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80 %	80 %	100 %
		2. Persentase kasus isu SARA	85 %	100 %	117,65 %
		3. Persentase penurunan konflik di masyarakat	85 %	100 %	117,65 %
2	Meningkatnya kualitas dana Partai Politik	1. Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan keuangan Parpol	70 %	70 %	107,14 %
		2. Persentase pemahaman peserta	80 %	80 %	100 %

		pembinaan politik dalam negeri			
--	--	--------------------------------	--	--	--

Sasaran 1 : Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

a. Persentase Pembinaan Terhadap Elemen Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

Target IKU dimaksud adalah jumlah peserta pembinaan yang memahami wawasan kebangsaan dibanding jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan, dengan target sebesar 80 % dan terealisasi 80 %, sehingga diperoleh capaian 100%

Rumus yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah peserta pembinaan yang memahami wawasan kebangsaan}}{\text{Jumlah elemen masyarakat yang dibina}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.1.

Pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan

No	Program//Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta yang paham	Keterangan
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional Kegiatan : 1. Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan	1.365 orang	1.075 orang	Yang diundang - Masyarakat 50x18=900 org - Kepala SKPD 60 org - Pelajar 110 org - Guru TK 90 org

				<ul style="list-style-type: none"> - Guru TPQ 90 org - Kepala Sekolah 115 org
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 orang	100 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Yang diundang Lurah, Trantib, Babinsa, Polmas, Ketua LPM dan bina wilayah se Kota Mojokerto

Sumber : Laporan Monev Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, peserta yang diundang sebesar 1.465 orang yang terdiri dari 900 orang dari masyarakat, 60 orang dari Kepala SKPD, 110 orang dari pelajar SMA/SMK Negeri dan Swasta, 90 orang dari guru TK, 90 orang guru TPQ dan 115 orang dari Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri dan swasta se wilayah Kota Mojokerto. Untuk menilai peserta yang paham tentang wawasan kebangsaan yaitu dengan cara memberi pertanyaan kepada audien secara acak, jika audien mampu menjawab dengan benar, maka dianggap peserta sudah paham akan wawasan kebangsaan sebesar yang ditargetkan yaitu 80 %.

Tidak ada kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
 - a. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan
 - a. Pembinaan Kewilayahan
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara

b. Persentase kasus isu SARA

Target IKU dimaksud adalah Jumlah kasus isu SARA yang tertangani dibanding dengan kasus isu SARA yang ada dengan target 85 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 117,65 %

Rumus yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah kasus isu SARA yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus isu SARA yang ada}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.2.

Isu SARA di Kota Mojokerto Tahun 2015

No	Isu SARA	Status isu SARA	Jumlah yg terlibat	Keterangan
1	Gafatar	tertangani	4 orang	
2	Saksi Yehuwa	tertangani	5 orang	

Sumber : Laporan Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Gafatar merupakan Gerakan Fajar Nusantara. Di Kota Mojokerto ada 4 orang yang terlibat Gafatar yaitu Suami Istri dan 2 orang anak dari Kelurahan Gunung Gedangan dan sudah tertangani, Untuk saksi Yehuwa jumlah yang terlibat 5 orang yang dilaksanakan di Jl. Taman Siswa Kelurahan Purwotengah dan sudah ditangani.

Kendala-kendala untuk menghadapi isu SARA adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya regulasi dan koordinasi pada instansi terkait.
2. Kurangnya koordinasi dengan Kelurahan-kelurahan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Melakukan koordinasi lintas SKPD
2. Koordinasi dengan RT, RW, Trantib, Kelurahan, Kecamatan

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

c. Persentase penurunan konflik di masyarakat

Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik yang tertangani dibanding jumlah konflik yang ada dengan target 85 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 117,65 %

Rumus yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.3.
Konflik / Unjuk Rasa di Kota Mojokerto

No	Konflik / Unjuk Rasa	Status Konflik	Peserta (orang)	Keterangan
1	Aksi Damai di Aloon-aloon	Tertangani	45	10-1-2015
2	Aksi Sosial di Aloon-aloon	Tertangani	100	16-1-2015
3	Aksi Damai di Depan Pemkot	Tertangani	78	14-2-2015
4	Aksi Damai di depan Pemkot	Tertangani	100	22-3-2015
5	Aksi Unjuk Rasa Paguyuban pedagang daging di depan rumah pemotongan hewan	Tertangani	20	9-4-2015
6	Aksi Bentang Spanduk di aloon-aloon	Tertangani	10	19-4-2015
7	Aksi Damai di depan SPBU Bhayangkara	Tertangani	7	26-4-2015
8	Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD	Tertangani	7	30-4-2015
9	Aksi Damai di perempatan Miji	Tertangani	7	30-4-2015
10	Aksi Damai di depan TMP	Tertangani	10	2-5-2015
11	Aksi Damai di Aloon-aloon	Tertangani	150	3-5-2015
12	Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD	Tertangani	37	4-5-2015
13	Aksi Damai di perempatan Empunala	Tertangani	10	18-5-2015
14	Aksi Unjuk Rasa di depan kantor BPN	Tertangani	120	20-5-2015
15	Aksi Unjuk Rasa di depan DPPKA	Tertangani	20	4-6-2015
16	Aksi Unjuk Rasa di Depan Pemkot	Tertangani	200	12-6-2015
17	Aksi Unjuk Rasa di Depan Pemkot	Tertangani	100	19-6-2015
18	Aksi Unjuk Rrasa di Depan Pemkot	Tertangani	11	30-11-2015

Sumber : Bidang Hanbang dan Wasnas

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa konflik / unjuk rasa yang ada di Kota Mojokerto tahun 2015 sebanyak 18 macam konflik dan telah tertangani semuanya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

2. Melakukan koordinasi lintas SKPD

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
 - a. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Forkominda
 - b. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat
 - c. Pemantauan kegiatan orang asing dan NGO
 - d. Penyusunan dan pengumpulan data

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dana Partai Politik

a. Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan keuangan Parpol

Target IKU dimaksud adalah Jumlah partai politik yang patuh terhadap tata cara pada pembinaan bantuan keuangan Parpol dibanding jumlah Partai politik yang dibina dengan target 70 % terealisasi 75 %, sehingga diperoleh capaian 117,65 %

Rumus yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jml Parpol yang patuh thd tat cara pd pembinaan bantuan Parpol}}{\text{Jumlah Parpol yang di bina}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan Partai Politik dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.4.

Parpol yang Patuh terhadap Tata Cara pada Bantuan Parpol

No	Nama Parpol	Jumlah Bantuan (Rp.)	SPJ yang diselesaikan		Keterangan
			Patuh	Tdk Patuh	
1	PDI-P	145.578.576	X		
2	PKB	75.214.128	X		
3	PAN	91.374.384	X		
4	GERINDRA	52.095984	X		
5	GOLKAR	64.280.304		X	
6	DEMOKRAT	48.576.960	X		
7	PKS	43.398.624	X		
8	PPP	41.530.896		X	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa

- PDI-P mendapat kursi 6, dengan jumlah 18.161 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 145.578.576,-
- PKB mendapat kursi 3, dengan jumlah 9.363 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 75.214.128,-
- PAN mendapat kursi 4, dengan jumlah 11.399 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 91.374.384,-

- GERINDRA mendapat kursi 3, dengan jumlah 6.499 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 52.095.984,-
- GOLKAR mendapat kursi 3, dengan jumlah 8.019 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 64.280.304,-
- DEMOKRAT mendapat kursi 2, dengan jumlah 6.060 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 48.576.960,-
- PKS mendapat kursi 2, dengan jumlah 5.414 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 43.398.624,-
- PPP mendapat kursi 2, dengan jumlah 5.181 suara, nilai per suara Rp. 8.016,- sehingga jumlah yang diterima Rp 41.530.896,-

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembinaan politik adalah kurangnya koordinasi fungsionaris Parpol dengan tim evaluasi Parpol

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan semua fungsionaris Parpol
2. Pendekatan dengan anggota Parpol

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri

Target IKU dimaksud adalah Jumlah peserta yang memahami pembinaan politik dibanding jumlah peserta sosialisasi pembinaan politik dengan target 80 % terealisasi 80 %, sehingga diperoleh capaian 100 %

Rumus yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah peserta yang memahami pembinaan politik}}{\text{Jumlah peserta sosialisasi pembinaan politik}} \times 100 \%$$

Capaian terhadap pembinaan politik dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pembinaan Politik Dalam Negeri

No	Program//Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta yang paham	Keterangan
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
	Kegiatan : - Penyuluhan kepada masyarakat	50 orang	41 orang	Masyarakat, RT dan RW

	- Koordinasi forum-forum diskusi politik	100 orang	79 orang	Mahasiswa dan fungsionaris Parpol
--	--	-----------	----------	-----------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembinaan politik dalam negeri, peserta yang diundang sebesar 150 orang yang terdiri dari masyarakat, RT,RW, fungsionaris Parpol engan peserta yang memahami pembinaan politik sebesar 120 orang. Untuk menilai peserta yang paham tentang pembinaan politik yaitu dengan cara memberi pertanyaan kepada audien secara acak, jika audien mampu menjawab dengan benar, maka dianggap peserta sudah paham tentang pembinaan politik dalam negeri sebesar yang ditargetkan yaitu 80 %, sehingga capaian kinerjanya 100 %

Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tidak bisa dilakukan perbandingan untuk tahun 2014 dan tahun 2015, karena ada perubahan / review tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama tahun 2015. Tahun 2014 adalah masa berakhirnya Walikota lama dan Tahun 2015 merupakan Walikota yang baru.

B. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	1.906.959.200	56,66 %
		2. Persentase kasus isu SARA	113.164.450	3,36 %

		3. Persentase penurunan konflik di masyarakat	1.080.392.450	32,10 %
2.	Meningkatnya kualitas dana Partai Politik	1. Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan Parpol	148.467.550	4,41 %
		2. Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri	116.410.875	3,46 %

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80 %	80 %	100%	56,66 %	56,57 %	99,84 %
		2. Persentase kasus isu SARA	85 %	100 %	117,65 %	3,36 %	3,45 %	102,68 %
		3. Persentase penurunan konflik di masyarakat	85 %	100 %	117,65 %	32,10 %	31,94%	99,50 %
2.	Meningkatnya kualitas dana Partai Politik	1. ersentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan Parpol	70 %	75 %	107,14 %	4,41 %	4,41 %	100%
		2. Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri	80 %	80 %	100 %	3,46 %	3,63 %	104,91 %

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	100 %	99,84 %	0,16 %
		2. Persentase kasus SARA	117,65 %	102,08 %	15,57 %
		3. Persentase penurunan konflik di masyarakat	117,65 %	99,50 %	18,15 %
2.	Meningkatnya kualitas dana Partai Politik	1. Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan Parpol	107,14 %	100 %	7,14 %
		2. Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri	100 %	104,91 %	-4,91 %

E. REALISASI ANGGARAN

Target dan Realisasi Anggaran / Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015, digambarkan sebagai berikut :

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Sasaran :			
	Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			
1.	Program :			
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	216.605.900,00	200.523.900,00	92,58 %

	Kegiatan : 1. Pembinaan Kewilayahan	216.605.900,00	200.524.900,00	92,58 %
2.	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	759.078.950,00	674.549.750,00	
	Kegiatan : 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	113.164.450,00	110.164.450,00	97,35 %
	2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	270.333.150,00	261.810.775,00	96,85 %
	3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaa bangsa	265.027.200,00	263.621.550,00	99,47 %
	4. Pemantapan forum pembauran kebangsaan	110.554.150,00	108.727.050,00	98,35 %
3.	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	469.899.800,00	317.122.800,00	97,72 %
	Kegiatan : 1. Seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	319.340.800,00	313.165.800,00	98,07 %
	2. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	150.559.000,00	138.646.600,00	92,09 %
4.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	1.654.931.450,00	709.120.700,00	91,99 %

	Kegiatan :			
	1. Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelegen Daerah (Forkominda)	501.290.000,00	482.302.500,00	96,21 %
	2. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	119.835.900,00	87.638.500,00	73,13 %
	3. Pemantauan Kegiatan Orang Asing	51.824.800,00	51.569.800,00	99,50 %
	4. Penyusunan dan Pengumpulan Data	26.554.450,00	26.449.450,00	99,60 %
	5. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	955.426.300,00	888.175.800,00	92,96 %
II	Sasaran : Meningkatnya kualitas dana Partai Politik			
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	264.878.425,00	795.806.500,00	93,21 %
	Kegiatan :			
	1. Penyuluhan kepada masyarakat	93.228.750,00	88,354,750,00	94,77%
	2. Koordinasi forum-forum diskusi politik	55.238.800,00	52.153.800,00	94,42 %
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	116.410.875,00	115.910.875,00	99,57 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2014-2019 maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2019.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

A. SARAN

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang mantap, yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di seluruh instansi pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai kalangan.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang mantap, sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kesatuan bangsa dan politik yang mantap.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka

optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Mojokerto, 29 Pebruari 2016

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670807 199203 1 005